

BUPATI KARIMUN TERIMA ANUGERAH OMBUDSMAN RI

Kamis, 28 November 2019 - Agung Setio Apriyanto

Penyerahan penganugrahan diberikan langsung oleh Anggota Ombudsman, Dr. Ahmad Suaedi dan diterima langsung oleh Bupati Karimun Dr Aunur Rafiq.

Kabag Humas Pemkab Karimun, Didi Irawan dalam pesan elektroniknya mengatakan penghargaan yang diraih tidak terlepas dari kerja keras dan kerjasama yang baik serta komitmen yang kuat dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.

"Memiliki komitmen yang kuat dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik sehingga dapat mengedepankan dan mengutamakan pendekatan informal dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik dari pada pendekatan formal yang birokratis, diharapkan dengan metode Propartif dengan keunggulannya melalui pendekatan informal hasilnya dapat diterima secara baik oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat sehingga lebih cepat dirasakan dan bermanfaat bagi semua pihak lebih efisien, terfokus dan tepat sasaran," ujar Didi kepada beritakarimun.com, melalui pesan elektroniknya.

Kegiatan Penyerahan Predikat Kepatuhan Tahun 2019 tersebut meliputi Kementerian, Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain terdiri dari 2 Kementerian, 12 Pemerintah Kota dan 71 Pemerintah Kabupaten.

Didi mengatakan, Ombudsman Republik Indonesia selaku pengawas pelayanan publik kembali menyampaikan hasil pengamatan terhadap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Hasil pengamatan yang dikemas melalui Penelitian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dikatakannya bertujuan mendorong penyelenggara negara mematuhi amanat ketentuan mengenai pelayanan publik.

"Mereka mendorong para penyelenggara pelayanan publik untuk senantiasa memperhatikan ketentuan mengenai standar

pelayanan. Dunia internasional telah membuktikan negara-negara yang memperhatikan pemenuhan informasi dasar telah mampu memberikan pelayanan publik secara berkualitas dan memperoleh predikat sebagai negara-negara maju. Mereka mendorong para penyelenggara pelayanan publik untuk senantiasa memperhatikan ketentuan mengenai standar pelayanan. Dunia internasional telah membuktikan negara-negara yang memperhatikan pemenuhan informasi dasar telah mampu memberikan pelayanan publik secara berkualitas dan memperoleh predikat sebagai negara-negara maju," kata Didi.